



PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

**YANG KITA
BAYAR UNTUK
PEMBANGUNAN
& KEMAJUAN
NUNUKAN**



Dipersembahkan Oleh :

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

**RENCANA
KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 telah disusun. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2020 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 merupakan dokumen tahunan yang disusun dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 ini.

Nunukan, Juli 2024

Kepala Badan



Fitraeni, S.Sos
197311302001122002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB II PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	13
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024	24
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Partisipatif yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana perangkat daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan,

bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan

Awal Renja perubahan dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
 21. Peraturan Nunukan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan);
 22. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan .

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
3. Mendapatkan penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan ;
4. Memastikan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan konsistensi program dan kegiatan sampai dengan dokumen penyusunan dokumen anggaran;
5. Memastikan konsistensi arah kebijakan perangkat daerah dengan rumusan pelaksanaannya melalui program/kegiatan;
6. Mendukung prioritas Kepala Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan .

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.2. Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2016 Sampai Dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
- 3.2. Matrik Rencana Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi ketercapaian target.

Rencana Kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 memuat memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan . Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Realisasi penyerapan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan tahun 2024 triwulan ke II adalah Rp 4.225.490.787 atau 43,48% dari target Rp Rp9.717.515.222. Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 tersebut di atas, berikut sub kegiatan yang persentase penyerapannya paling rendah:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari anggaran sebesar Rp 3.135.000 terealisasi Rp 0 atau 0.00%
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari anggaran sebesar Rp 2.090.000 terealisasi Rp 0 atau 0.00%
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari anggaran sebesar Rp 156.774.610 terealisasi Rp15.920.000.33.523.732 atau 10,15%

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dari anggaran sebesar Rp 53.319.770 terealisasi Rp 9.041.600 atau 16,96%
5. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dari anggaran sebesar Rp 311.638.600 terealisasi Rp 50.394.722 atau 16,17%
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dari anggaran Rp187.011.600 terealisasi Rp 23.620.000 atau 12,63%

TABEL 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2024 (TRIWULAN II)

URAIAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp	(%)	
BELANJA		9.717.515.222	4.225.490.787	43,48	5.492.024.435
Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7.066.421.422,00	3.669.190.012,00	41,51	3.397.230.810,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.225.000,00	0	0	5.225.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.135.000	0	0	3.135.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.090.000	0	0	2.090.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.983.805.857	3.470.256.926	57,99	2.513.548.931
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.983.805.857	3.470.256.926	57,99	2.513.548.931
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	613.959.430	87.866.086	14,28	527.275.449
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.774.610	15.920.000	10,15	140.854.610
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	219.161.325	0	0,00	219.161.325
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.205.600	71.946.086	30,08	167.259.514
Program Pengelolaan keuangan Daerah		311.638.600	50.394.722	16,17	261.243.878
IV	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	311.638.600	50.394.722	16,17	261.243.878
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi,	311.638.600	50.394.722	16,17	261.243.878

	monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		2.339.455.200	505.905.453	21,62	1.833.549.747
V	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.339.455.200	505.905.453	21,62	1.833.549.747
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	50.808.100	26.616.000	52,39	24.192.100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.289.000	0	0,00	50.289.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	193.485.100	39.973.000	20,66	153.512.100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50.289.000	26.616.000	52,39	24.192.100
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	188.074.200	60.329.175	32,08	127.745.025
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	234.285.000	68.320.000	29,16	165.965.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	87.011.600	23.620.000	12,63	163.391.600
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	246.313.000	47.037.000	19,10	199.276.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	220.323.000	64.645.000	29,34	155.678.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9.860.000	0	0,00	9.860.000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	83.083.200	2.550.000	3,07	80.533.200
	Penagihan Pajak Daerah	230.669.600	103.056.000	44,68	127.613.600
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19.560.000	0	0,00	19.560.000

Penerapan efisiensi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah menimbulkan tantangan berupa terbatasnya dukungan terhadap kegiatan sosialisasi dan pengawasan, sehingga diperlukan strategi agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Hingga triwulan ke II secara keseluruhan penggunaan anggaran telah mencapai 43,48%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Realisasi Kinerja tujuan persentase PAD terhadap pendapatan mencapai 8,26% dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan PAD masih menunjukkan angka negatif atau -43,04%. Berikut disajikan tabel evaluasi Renja triwulan II:

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan

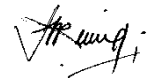
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
	Bidang Urusan Perencanaan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100%	30.424.418.780	100%	9.516.212.760	50%	238.500.000	50	3	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	2	3.000.000	1	-	50	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	10.000.000	3	2.000.000	2	-	67	0	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	5 dokumen	50.000.000	1	10.000.000	0	-	0	0	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	5 dokumen	50.000.000	1	10.000.000	0	-	0	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	155 orang/bulan	16.473.072.480	31	8.693.628.777	31	3.470.256.926	100	40	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	215 paket	370.711.250	43	159.768.840	20	15.920.000	47	10	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	130 paket	1.136.965.000	26	133.171.500	0	-	0	0	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporam	549.456.000	5	125.263.200	2	71.946.086	40	57	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 laporan	383.713.000	12	72.732.531	6	18.180.000	50	25	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	10.832.313.550	12	243.308.310	6	83.846.000	50	34	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105 unit	328.187.500	21	53.339.602	4	9.041.600	19	17	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 unit	225.000.000	7	10.000.000	2	0	29	0	
	Program pengelolaan keuangan	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100%	1.190.396.000	100%	122.040.317	42%	50.394.722	42	41	
	koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	5 dokumen	1.190.396.000	1	122.040.317	1	50.394.722	100	41	
	Program pengelolaan pendapatan	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	3 persen	7.188.395.400	2,38%	1.129.492.430	-85%	505.905.453	-3571	7	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	10 dokumen	250.000.000	2	50.000.000	1	26.616.000	50	53	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	9 laporan	1.000.000.000	1	79.106.000	1	2.550.000	100	3	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	10 unit	500.000.000	2	149.909.600	0	-	0	0	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	60 laporan	750.000.000	5	182.557.400	4	39.973.000	80	22	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	17 dokumen	230.136.000	4	55.073.800	0	-	0	0	

	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	25 laporan	500.000.000	5	46.660.000	2	68.320.000	40	146	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	120 layanan	50.000.000	120	10.000.000	0	-	0	0	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	326170 laporan	250.000.000	67436	69.770.000	60329	23.620.000	89	34	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	25 objek pajak	1.001.307.400	5	130.938.020	1	47.037.000	20	36	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	326770 dokumen	1.326.123.000	69131	150.000.000	69131	64.645.000	100	43	
	Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	26 dokumen	1.001.307.400	5	100.793.600	3	103.056.000	60	102	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 dokumen	100.000.000	5	10.000.000	0	-	0	0	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	110 dokumen	588.914.000	22	11.884.000	5	43.649.278	23	367	
	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	35 laporan	100.000.000	7	147.832.300	2	26.110.000	29	18	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 laporan	0	2	188.074.200	2	60.329.175	100	32	
	Jumlah					10.767.745.507					

Nunukan, 12/7/2024

Kepala



(Fitraeni, Sos)
NIP.19731130200122002

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian.

1. Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Penerapan Tarif Pajak

Sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan pengenaan tarif pajak 10%, sehingga potensi penerimaan daerah belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan regulasi.

2. Belum Tersedianya Alat Ukur atas Objek Pajak Tertentu

Belum adanya alat ukur pemakaian air tanah dan mekanisme pencatatan yang valid untuk penjualan sarang burung walet menyebabkan potensi pendapatan tidak terukur secara akurat.

3. Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak (WP)

Masih terdapat sejumlah wajib pajak yang terlambat melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengganggu target realisasi penerimaan daerah.

4. Ketidaksesuaian Laporan Pajak dengan Omzet Usaha

Sebagian besar wajib pajak tidak melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan omzet usaha sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.

5. Keterbatasan SDM Fungsional Pemeriksa Pajak

Belum adanya personel atau staf fungsional pemeriksa pajak (juru sita) menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum pajak daerah tidak berjalan optimal.

6. Tingkat Kepatuhan yang Rendah Meski Telah Dilakukan Pembinaan

Masih terdapat wajib pajak yang sudah diberikan pembinaan namun tetap tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Hal ini menuntut strategi penegakan hukum yang lebih tegas dan terukur.

Oleh sebab tersebut di atas, maka diperlukan upaya atau strategi yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu

1. Melakukan uji potensi dan pengawasan bersama serta pemeriksaan sederhana
2. Mengarahkan agar pelaku usaha air tanah menggunakan alat ukur (water meter) serta melakukan pengawasan dengan melibatkan satpol pp dan instansi terkait
3. Menerapkan pengenaan denda terhadap wp yang telat lapor dan telat bayar
4. Melakukan uji potensi dan pengawasan bersama serta pemeriksaan sederhana
5. Mengusulkan kepada bkpsdm agar membuka formasi cpns khusus untuk pemeriksa pajak atau menempatkan pns yang bersedia mengikuti diklat juru sita
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin bekerjasama dengan satpol pp

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan
Renja Tahun 2024

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam rancangan RKPD perubahan kabupaten Nunukan tahun 2024 maka Badan Pendapatan Daerah merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 triwulan IV:

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN NUNUKAN

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kab. Nunukan

NO	URUSAN BIDANG	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA			PAGU			KETERANGAN
						RKPD 2024	DPA (APBD 2024)	PERUBAHAN RKPD 2024	RKPD 2024	DPA (APBD 2024)	PERUBAHAN RKPD 2024	
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	KEUANGAN								7.568.191.856	7.716.462.537	8.931.770.887	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	5.410.828.765	5.794.520.637	6.140.409.487	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	4.917.000	4.917.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	2.981.000	2.981.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	2.000.000	1.936.000	1.936.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	24 dokumen	3.812.435.215	4.686.528.827	4.686.528.827	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	31 orang	3.812.435.215	4.686.528.827	4.686.528.827	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	651.013.450	637.777.590	983.666.440	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	200.000.000	195.755.890	309.992.740	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik yang disediakan	Jumlah paket logistik yang disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	183.587.000	183.587.000	183.587.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	25 paket	25 paket	25 paket	117.426.450	133.171.500	212.871.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	150.000.000	125.263.200	277.215.200	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2 laporan	876.742.600	374.500.920	374.500.920	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	76.742.600	76.392.600	76.392.600	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	800.000.000	298.108.320	298.108.320	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpelihanya barang milik daerah di bapenda	Jumlah Barang milik Daerah yang dipelihara	100%	28 Unit	28 Unit	65.637.500	90.796.300	90.796.300	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	65.637.500	90.796.300	90.796.300	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100%	100%	100%	250.130.000	265.281.200	315.281.200	

		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah	100%	6 kali	6 kali	250.130.000	265.281.200	315.281.200	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	250.130.000	265.281.200	315.281.200	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	Persentase Pertumbuhan pajak daerah	11,73%	75,71%	0,59%	1.935.224.600	1.656.660.700	2.476.080.200	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah pajak daerah	100%	Rp30.519.113.000	Rp30.519.113.000	1.935.224.600	1.656.660.700	2.476.080.200	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	55.073.800	113.858.800	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah	jumlah sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah	12 Kali	12 Kali	12 Kali	150.000.000	182.557.400	202.707.400	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah ketersediaan sarana dan prasarana	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000	149.792.600	131.815.000	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang terdaftar	jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 laporan	250.000.000	267.690.000	267.690.000	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah data wajib pajak daerah	jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60329 Laporan	60329 Laporan	60329 Laporan	70.000.000	69.770.000	159.831.600	
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	5 obyek pajak	5 obyek pajak	5 obyek pajak	250.000.000	243.231.200	402.620.000	

			Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan	jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	56162 wp	40000 wp	56162 wp	265.224.600	258.170.000	258.170.000	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.272.100	11.510.000	
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		180.884.000	203.625.600	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000	18.700.000	18.700.000	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	200.000.000	220.519.600	287.137.400	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pajak daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	150.000.000	149.703.000	228.653.000	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000	201.281.400	189.761.400	
TOTAL									7.596.183.365	7.716.462.537	8.931.770.887	

Kepala Badan



Fitraeni, S.Sos

Nip 197311302001122002

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Renja tahun 2024 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung dan diselaraskan dengan misi IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimana kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan agenda reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi dengan pelayanan publik yang responsif, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya menjadi kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN menjadi upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini didukung oleh perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan keuangan daerah yang berkualitas adalah Optimalisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan sasaran pada Meningkatnya Penerimaan PAD.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan
Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Optimalisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	2,75%

BAB IV

PENUTUP

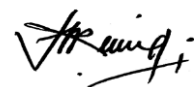
Renja Badan Pendapatan Daerah perubahan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Pendapatan Daerah guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, isi dokumen Renja ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024 sesuai dengan yang dicita-citakan. Hingga triwulan kedua pelaksanaan renja tahun 2018 tidak terdapat kendala teknis yang bisa menghambat pencapaian indikator kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, kendala terbatas pada ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Nunukan, Juli 2024

Kepala Badan



Fitraeni, S.Sos

NIP.19731130 2001122002

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NUNUKAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26						10.585.278.106,74		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74		
	5.02	KEUANGAN							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	7.442.096.029,74	7.066.421.422,00	7.066.421.422,00	1.317.685.277,00							8.759.781.306,74		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				4 dokumen	4 dokumen	5.000.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	225.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	135.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	90.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah				24 dokumen	24 dokumen	6.619.512.046,74	5.983.805.857,00	5.983.805.857,00	-635.706.189,74			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		5.969.512.046,74	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	0,00	5.983.805.857,00	5.983.805.857,00	5.983.805.857,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			5.969.512.046,74	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74		
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74		
	5.02	KEUANGAN							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74		
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	33.007.864,00	33.007.864,00	13.007.864,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	17.612.700,00	17.612.700,00	7.612.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	15.395.164,00	15.395.164,00	5.395.164,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	418.203.540,00	615.141.535,00	615.141.535,00	196.937.995,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		411.426.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	159.768.840,00	156.774.610,00	156.774.610,00	-2.994.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			74.142.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	133.171.500,00	219.161.325,00	219.161.325,00	85.989.825,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			227.393.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	125.263.200,00	239.205.600,00	239.205.600,00	113.942.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			109.891.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	316.040.841,00	366.097.896,00	366.097.896,00	50.057.055,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		2.243.205.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.732.531,00	73.992.600,00	73.992.600,00	1.260.069,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			76.742.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	243.308.310,00	292.105.296,00	292.105.296,00	48.796.986,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			2.166.462.710,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.339.602,00	63.143.270,00	63.143.270,00	-196.332,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		110.637.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	53.339.602,00	53.319.770,00	53.319.770,00	-19.832,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			65.637.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.823.500,00	9.823.500,00	-176.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah				100 Persen	100 Persen	122.040.317,00	311.638.600,00	311.638.600,00	116.038.883,00							238.079.200,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah				6 kali	6 kali	122.040.317,00	311.638.600,00	311.638.600,00	189.598.283,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		238.079.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	122.040.317,00	311.638.600,00	311.638.600,00	189.598.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			238.079.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah				2.38 Persen	2.38 Persen	1.129.492.430,00	2.339.455.200,00	2.339.455.200,00	457.925.170,00							1.587.417.600,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pajak daerah				175251269 81 Rp	175251269 81 Rp	1.129.492.430,00	2.339.455.200,00	2.339.455.200,00	1.209.962.770,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		1.587.417.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.808.100,00	50.808.100,00	808.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	55.073.800,00	50.289.000,00	50.289.000,00	-4.784.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			46.027.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	182.557.400,00	193.485.100,00	193.485.100,00	10.927.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	149.909.600,00	222.630.000,00	222.630.000,00	72.720.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	46.660.000,00	234.285.000,00	234.285.000,00	187.625.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				67436 Laporan	67436 Laporan	69.770.000,00	187.011.600,00	187.011.600,00	117.241.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	130.938.020,00	246.313.000,00	246.313.000,00	115.374.980,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				69131 Dokumen	69131 Dokumen	150.000.000,00	220.323.000,00	220.323.000,00	70.323.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			265.224.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				120 Layanan	120 Layanan	10.000.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	-140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	79.106.000,00	83.083.200,00	83.083.200,00	3.977.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	100.793.600,00	230.669.600,00	230.669.600,00	129.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			108.383.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00	9.560.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	11.884.000,00	255.231.100,00	255.231.100,00	243.347.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			117.782.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				7 Laporan	7 Laporan	52.800.010,00	147.832.300,00	147.832.300,00	95.032.290,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	188.074.200,00	188.074.200,00	158.074.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		J U M L A H							8.693.628.776,74	9.717.515.222,00	9.717.515.222,00	1.023.886.445,26							10.585.278.106,74	

Nunukan 24 September 2024
Kepala



Fitraeni, S.sos
Nip.197311302001122002